

Legitimasi Negara dan Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Wilayah Pedalaman Papua Selatan

Anugerah Mulia Utami^{1*}, Nurul Uswatun Hasanah², Eko Rachmat Saputro³, Adela Anita⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Musamus, Jl. Kamizaun, Mopah Lama, Rimba Jaya, Kec. Merauke, Kabupaten Merauke, 99611, Papua Selatan, Indonesia.

E-mail: anugerahmuliautami@unmus.ac.id

*Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.6016>

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article history:

Received: 22 Apr 2026

Revised: 28 Apr 2026

Accepted: 04 May 2026

Kata Kunci:

Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
Implementasi Kebijakan;
Keadilan Distributif;
Kapasitas Kelembagaan;
Wilayah Pedalaman

Keywords:

Free Nutritious Meals Program (MBG); Policy Implementation;
Distributive Justice;
Institutional Capacity;
Remote Areas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Mappi, Papua Selatan, melalui perspektif sosial-politik dengan menyoroti dinamika distribusi, kapasitas kelembagaan, serta persepsi keadilan di wilayah pedalaman. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus intrinsik guna memahami secara komprehensif proses translasi kebijakan nasional ke dalam praktik lokal. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif terbatas, dan analisis dokumen terhadap 25 informan yang melibatkan berbagai aktor lokal. Hasil penelitian menunjukkan lima temuan utama, yaitu: (1) keterbatasan akses dan kendala logistik sebagai faktor struktural utama; (2) kapasitas kelembagaan dan koordinasi antarlevel pemerintahan yang belum optimal; (3) pentingnya adaptasi budaya dalam implementasi program; (4) persepsi ketimpangan distribusi; serta (5) dimensi simbolik kebijakan dalam membentuk legitimasi negara. Penelitian ini menegaskan bahwa implementasi MBG tidak semata ditentukan oleh desain kebijakan, melainkan sangat dipengaruhi oleh kondisi struktural, kapasitas lokal, serta sensitivitas terhadap konteks sosial-budaya. Secara teoretis, studi ini memperkaya kajian kebijakan publik dengan mengintegrasikan perspektif keadilan distributif dan multilevel governance. Secara praktis, penelitian ini menekankan pentingnya fleksibilitas kebijakan dan pendekatan afirmatif dalam distribusi program sosial di wilayah pedalaman.

This study aims to examine the implementation of the Free Nutritious Meals Program (MBG) in Mappi Regency, South Papua, through a socio-political perspective by highlighting the dynamics of distribution, institutional capacity, and perceptions of justice in remote areas. A qualitative approach was employed using an intrinsic case study design to comprehensively understand the process of translating national policy into local practice. Data were collected through semi-structured interviews, limited participant observation, and document analysis involving 25 informants representing various local actors. The findings reveal five main points: (1) limited access and logistical constraints as primary structural factors; (2) suboptimal institutional capacity and coordination across levels of government; (3) the importance of cultural adaptation in program implementation; (4) perceived inequalities in distribution; and (5) the symbolic dimension of policy in shaping state legitimacy. This study underscores that the implementation of the MBG program is not solely determined by policy design, but is also significantly influenced by structural conditions, local capacity, and sensitivity to socio-cultural contexts. Theoretically, this research contributes to public policy studies by integrating perspectives on distributive justice and multilevel governance. Practically, it highlights the importance of policy flexibility and affirmative approaches in distributing social programs in remote regions.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Anugerah Mulia Utami, et al. (2026), Legitimasi Negara dan Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Wilayah Pedalaman Papua Selatan, 4(4). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.6016>

PENDAHULUAN

Permasalahan pemenuhan gizi pada peserta didik merupakan isu strategis dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diperkenalkan sebagai kebijakan nasional yang diarahkan untuk menanggulangi stunting sekaligus mengurangi ketimpangan akses terhadap pangan bergizi di lingkungan sekolah. Meskipun dirancang sebagai program universal, implementasinya menunjukkan variasi capaian antarwilayah yang cukup signifikan. Di satu sisi, kebijakan ini membuka peluang intervensi gizi secara luas, namun di sisi lain, realitas empiris memperlihatkan adanya kesenjangan akses antara wilayah perkotaan dan daerah pedalaman yang perlu dianalisis dalam kerangka sosial-politik (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2024).

Pada tingkat nasional, berbagai laporan awal menunjukkan bahwa pelaksanaan MBG telah menjangkau sejumlah wilayah, termasuk kawasan Papua, dengan dampak yang beragam terhadap kondisi kesehatan dan sosial ekonomi masyarakat. Meskipun pemerintah menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui intervensi gizi di sekolah, sejumlah kajian kebijakan daerah mengidentifikasi adanya kendala struktural seperti keterbatasan anggaran, hambatan logistik, serta lemahnya koordinasi antarinstansi yang memengaruhi efektivitas implementasi program. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan berskala nasional tidak selalu menghasilkan implikasi yang seragam dalam konteks lokal (Wuisan, 2025).

Fokus penelitian ini diarahkan pada Kabupaten Mappi di Papua Selatan sebagai representasi wilayah pedalaman yang memiliki keterbatasan infrastruktur, jaringan distribusi, dan akses terhadap layanan publik. Karakteristik geografis berupa dominasi wilayah rawa dan sungai serta keterbatasan transportasi menjadikan proses implementasi kebijakan menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan wilayah perkotaan. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan terkait distribusi program, termasuk keterlambatan pasokan bahan pangan, keterbatasan fasilitas dapur, serta kebutuhan penyesuaian menu dengan kondisi lokal. Situasi ini memunculkan pertanyaan kritis mengenai legitimasi kebijakan, keadilan distribusi, dan akuntabilitas dalam implementasi MBG di wilayah perifer (McGibbon, 2020).

Perbandingan antarwilayah menunjukkan bahwa daerah perkotaan dengan tingkat pembangunan yang lebih tinggi cenderung memiliki kesiapan yang lebih baik dalam mengimplementasikan program MBG, terutama karena didukung oleh infrastruktur, sumber daya manusia, dan sistem distribusi yang lebih memadai. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai apakah alokasi kebijakan justru memperkuat ketimpangan wilayah atau berfungsi sebagai instrumen pemerataan. Dalam konteks desentralisasi, dinamika ini menjadi penting untuk dianalisis karena mencerminkan relasi antara kapasitas daerah dan distribusi kebijakan publik (Satriawan & Hadi, 2022).

Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk menggali secara mendalam pengalaman, makna, serta dinamika sosial-politik yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan melalui pendekatan kuantitatif. Melalui pendekatan ini, perspektif berbagai aktor lokal—seperti guru, orang tua, aparatur pemerintah daerah, pengelola program, serta tokoh masyarakat—dapat diidentifikasi untuk memahami bagaimana kebijakan nasional diterjemahkan, dinegosiasikan, atau bahkan mengalami resistensi pada tingkat lokal (Creswell & Poth, 2021).

Secara teoretis, penelitian ini berangkat dari perspektif kebijakan publik dan multilevel governance yang menekankan pentingnya interaksi antara pemerintah pusat dan daerah dalam implementasi kebijakan. Dalam sistem desentralisasi, implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan, tetapi juga oleh kapasitas administratif dan politik di tingkat lokal. Oleh karena itu, analisis ini mengintegrasikan konsep kapasitas kelembagaan, keadilan distributif, serta pendekatan kritis dalam kebijakan sosial untuk memahami bagaimana keputusan teknis dan politik memengaruhi hasil implementasi (Pierre & Peters, 2020).

Tinjauan literatur terkini menunjukkan bahwa penelitian mengenai program MBG masih didominasi oleh pendekatan teknis dan kuantitatif yang berfokus pada aspek gizi dan capaian program. Sementara itu, kajian yang menelaah dinamika sosial-politik implementasi di wilayah pedalaman masih relatif terbatas. Kekosongan ini menunjukkan perlunya penelitian yang menempatkan pengalaman aktor lokal serta konteks sosial sebagai pusat analisis, terutama di wilayah 3T seperti Kabupaten Mappi (Hickey & King, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi MBG di Kabupaten Mappi dengan fokus pada tiga aspek utama, yaitu: (1) bagaimana aktor lokal memahami dan merespons kebijakan, (2)

bagaimana praktik distribusi dan pengelolaan program dijalankan di tingkat lokal, serta (3) bagaimana implikasi politik alokasi sumber daya memengaruhi keadilan akses antarwilayah. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menangkap kompleksitas pengalaman sosial serta dinamika kebijakan yang terjadi di lapangan (Merriam & Tisdell, 2021).

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian kebijakan publik dengan mengintegrasikan perspektif keadilan distributif dan multilevel governance dalam konteks wilayah pedalaman. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi perumusan kebijakan yang lebih adaptif, responsif terhadap kondisi geografis, serta sensitif terhadap konteks sosial-budaya lokal, sehingga tujuan pengurangan ketimpangan gizi dapat tercapai secara lebih efektif (World Bank, 2023).

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus intrinsik. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan utama penelitian adalah memahami secara mendalam proses implementasi kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Mappi dalam perspektif sosial-politik, termasuk makna, pengalaman, dan dinamika relasi antaraktor yang terlibat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengeksplorasi realitas sosial secara kontekstual dan holistik, sehingga mampu menangkap kompleksitas interaksi kebijakan pada level lokal (Creswell & Poth, 2021; Merriam & Tisdell, 2021).

Studi kasus intrinsik dipilih karena penelitian berfokus pada satu konteks spesifik, yaitu implementasi MBG di Kabupaten Mappi sebagai wilayah pedalaman dengan karakteristik geografis dan sosial-politik yang unik. Studi kasus memungkinkan analisis mendalam terhadap fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata ketika batas antara fenomena dan konteks tidak tampak secara tegas (Yin, 2022). Dalam kerangka ini, MBG tidak diperlakukan sebagai fenomena umum, melainkan sebagai kasus kebijakan sosial yang diimplementasikan di wilayah perifer dengan dinamika distribusi sumber daya yang khas.

Pemilihan desain ini sejalan dengan tujuan penelitian untuk menggali proses penerjemahan kebijakan nasional ke tingkat lokal, mengidentifikasi pola interaksi antaraktor, serta memahami implikasi distribusi kebijakan terhadap persepsi keadilan sosial. Dengan demikian, studi kasus memberikan kerangka metodologis yang sesuai untuk menelaah dimensi struktural dan kultural secara simultan.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Mappi, Provinsi Papua Selatan, yang dipilih secara purposif berdasarkan pertimbangan relevansi konteks terhadap fokus kajian. Kabupaten Mappi merupakan wilayah dengan karakteristik geografis berupa rawa dan sungai yang dominan, akses transportasi terbatas, serta distribusi penduduk yang tersebar. Kondisi tersebut menjadikan Mappi representatif sebagai daerah pedalaman yang menghadapi tantangan implementasi kebijakan sosial nasional. Penelitian lapangan dilaksanakan selama delapan bulan, mulai Januari hingga Agustus 2025. Rentang waktu ini dipilih untuk memungkinkan peneliti melakukan observasi berulang terhadap proses implementasi MBG di beberapa sekolah serta memfasilitasi interaksi mendalam dengan informan. Periode tersebut juga memungkinkan triangulasi waktu, sehingga peneliti dapat membandingkan konsistensi data yang diperoleh pada fase awal dan akhir penelitian.

Subjek Penelitian

Partisipan penelitian terdiri atas aktor-aktor yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam implementasi MBG di tingkat lokal. Pemilihan informan dilakukan melalui teknik purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut ;

1. Guru atau kepala sekolah yang sekolahnya menjadi penerima program MBG.
2. Aparatur pemerintah daerah yang terlibat dalam koordinasi atau pengawasan program.
3. Pengelola dapur atau petugas distribusi MBG di tingkat distrik.
4. Orang tua siswa penerima manfaat.
5. Tokoh masyarakat atau tokoh adat yang memiliki pengaruh sosial di komunitas setempat.

Kriteria tersebut dirumuskan untuk memastikan keterwakilan perspektif administratif, operasional, dan sosial dalam analisis kebijakan. Jumlah informan utama sebanyak 25 orang, dengan komposisi yang disesuaikan dengan distribusi aktor di lapangan. Selain purposive sampling, teknik snowball sampling digunakan untuk mengidentifikasi informan tambahan yang dianggap relevan berdasarkan rekomendasi informan awal. Teknik ini penting dalam konteks wilayah pedalaman, di mana akses sosial sering kali bergantung pada jaringan kepercayaan komunitas (Palinkas et al., 2020).

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik untuk menjamin kedalaman dan keabsahan informasi, yaitu wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif terbatas, dan studi dokumentasi.

1. Wawancara Semi-Terstruktur

Wawancara semi-terstruktur digunakan sebagai teknik utama untuk menggali pengalaman dan persepsi informan. Panduan wawancara disusun berdasarkan kerangka teori implementasi kebijakan, keadilan distributif, dan multilevel governance. Pertanyaan dirancang terbuka untuk memungkinkan eksplorasi narasi informan secara mendalam (Creswell & Poth, 2021). Wawancara berlangsung antara 45–90 menit dan direkam dengan persetujuan informan. Topik wawancara meliputi proses distribusi program, kendala logistik, koordinasi antarlevel pemerintahan, adaptasi budaya menu, serta persepsi terhadap keadilan distribusi.

2. Observasi Partisipatif Terbatas

Observasi dilakukan di beberapa sekolah penerima MBG untuk melihat secara langsung proses distribusi makanan, interaksi antara pengelola dan siswa, serta kondisi sarana pendukung. Observasi bersifat partisipatif terbatas, di mana peneliti hadir sebagai pengamat tanpa terlibat dalam pengambilan keputusan operasional. Catatan lapangan (field notes) disusun secara sistematis, mencakup deskripsi situasi, interaksi sosial, dan refleksi peneliti. Teknik ini penting untuk mengonfirmasi data wawancara serta menangkap aspek nonverbal dan konteks sosial yang tidak terungkap melalui percakapan formal.

3. Dokumentasi

Dokumen yang dianalisis meliputi pedoman teknis MBG, laporan pemerintah daerah, notulen rapat koordinasi, serta data statistik terkait distribusi program. Analisis dokumen digunakan untuk memahami kerangka normatif kebijakan serta membandingkannya dengan praktik di lapangan.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2019) yang meliputi tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, transkrip wawancara dan catatan lapangan dibaca berulang untuk mengidentifikasi tema-tema awal. Proses koding dilakukan secara terbuka dengan mengelompokkan unit makna yang relevan dengan fokus penelitian. Tahap penyajian data dilakukan melalui matriks tematik yang memuat hubungan antaraktor, dinamika implementasi, serta persepsi keadilan distribusi. Tahap terakhir berupa penarikan kesimpulan dilakukan secara iteratif dengan membandingkan temuan lapangan dengan kerangka teori yang digunakan. Proses ini memungkinkan integrasi antara data empiris dan landasan teoretis

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif terbatas, dan telaah dokumen kebijakan daerah, penelitian ini mengidentifikasi lima tema utama yang merepresentasikan dinamika implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Mappi dalam perspektif sosial-politik, yaitu: (1) ketimpangan akses dan logistik sebagai faktor struktural; (2) kapasitas kelembagaan dan koordinasi antarlevel pemerintahan; (3) adaptasi budaya dan penerimaan sosial; (4) persepsi keadilan distributif; serta (5) legitimasi negara dan makna politik kebijakan di wilayah periferal.

Ketimpangan Akses dan Logistik sebagai Faktor Struktural

Tema pertama yang muncul secara konsisten dari data adalah hambatan struktural berupa keterbatasan akses transportasi dan infrastruktur distribusi. Informan dari kalangan kepala sekolah dan pengelola dapur menyampaikan bahwa distribusi bahan pangan sangat bergantung pada jalur sungai dan kondisi cuaca. Salah satu kepala sekolah di distrik pedalaman menyatakan:

“Kalau air sungai surut atau cuaca buruk, bahan makanan bisa terlambat sampai satu minggu. Anak-anak jadi tidak dapat makan sesuai jadwal.” Observasi lapangan memperlihatkan bahwa tidak semua sekolah memiliki fasilitas penyimpanan bahan pangan yang memadai. Dalam beberapa kasus, keterlambatan distribusi memaksa sekolah menyesuaikan jadwal pembagian makanan atau mengganti menu dengan bahan lokal yang tersedia.

Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi MBG di Mappi tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan normatif, tetapi juga oleh struktur geografis yang membatasi kapasitas operasional. Ketimpangan infrastruktur antara wilayah perkotaan dan pedalaman menjadi faktor determinan dalam konsistensi program.

Kapasitas Kelembagaan dan Koordinasi Antarlevel Pemerintahan

Tema kedua berkaitan dengan kapasitas administratif dan pola koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Informan dari pemerintah daerah mengungkapkan bahwa standar operasional prosedur (SOP) dari pusat sering kali belum sepenuhnya mempertimbangkan konteks geografis lokal. Seorang pejabat dinas pendidikan menyampaikan: “Petunjuk teknis dari pusat sudah jelas, tetapi pelaksanaannya di sini tidak selalu bisa sama. Jarak antar sekolah jauh, biaya operasional tinggi, dan tenaga pengelola terbatas.”

Analisis dokumen rapat koordinasi menunjukkan adanya penyesuaian lokal terhadap mekanisme distribusi, termasuk pembentukan dapur komunal berbasis distrik. Namun, keterbatasan sumber daya manusia terlatih menyebabkan beban kerja tinggi pada beberapa pengelola. Data ini mengindikasikan bahwa kapasitas kelembagaan lokal menjadi variabel penting dalam menentukan efektivitas implementasi. Koordinasi vertikal yang kurang fleksibel berpotensi menghambat adaptasi kebijakan pada konteks pedalaman.

Adaptasi Budaya dan Penerimaan Sosial

Tema ketiga menunjukkan pentingnya dimensi budaya dalam implementasi MBG. Beberapa orang tua dan tokoh masyarakat menyampaikan bahwa menu standar nasional tidak selalu sesuai dengan pola konsumsi lokal. Seorang tokoh adat menyatakan: “Anak-anak di sini biasa makan sagu dan ikan. Kalau menunya terlalu berbeda, kadang tidak habis dimakan.” Pengamatan lapangan memperlihatkan adanya upaya adaptasi menu dengan memasukkan bahan pangan lokal seperti sagu dan ikan air tawar. Adaptasi ini meningkatkan penerimaan siswa dan memperkuat partisipasi komunitas dalam pengadaan bahan baku.

Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sosial tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis, tetapi juga oleh sensitivitas terhadap budaya lokal.

Persepsi Keadilan Distributif

Tema keempat berkaitan dengan persepsi masyarakat terhadap keadilan distribusi program. Sebagian informan membandingkan kondisi di Mappi dengan kota-kota besar yang dinilai lebih siap secara fasilitas. Seorang guru menyampaikan: “Kami lihat di kota besar pelaksanaannya lebih lancar. Di sini masih banyak kendala. Padahal kebutuhan anak-anak kami lebih mendesak.”

Persepsi ini mencerminkan kesadaran kolektif mengenai ketimpangan wilayah. Meskipun masyarakat mengapresiasi keberadaan MBG, mereka menilai bahwa prioritas implementasi seharusnya lebih menitikberatkan pada daerah paling membutuhkan.

Legitimasi Negara dan Makna Politik Kebijakan

Tema terakhir menunjukkan bahwa MBG dimaknai bukan sekadar program gizi, tetapi juga simbol kehadiran negara di wilayah periferal. Seorang orang tua siswa menyatakan: “Kalau program ini berjalan baik, kami merasa pemerintah benar-benar memperhatikan kami.” Namun, ketika distribusi terhambat, muncul persepsi bahwa kebijakan kurang berpihak pada daerah pedalaman. Dengan demikian, implementasi MBG memiliki implikasi simbolik terhadap legitimasi negara di mata masyarakat lokal.

Diskusi Penelitian

Temuan penelitian ini memperkuat argumen teori implementasi kebijakan bahwa keberhasilan program publik sangat dipengaruhi oleh kesesuaian antara desain kebijakan dan kapasitas lokal. Dalam konteks multilevel governance, variasi implementasi di Kabupaten Mappi menunjukkan adanya kesenjangan antara standar nasional dan realitas daerah. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa kebijakan nasional dalam sistem desentralisasi cenderung menghasilkan diferensiasi praktik di tingkat

lokal. Dari perspektif keadilan distributif, temuan mengenai persepsi ketimpangan akses menunjukkan bahwa prinsip prioritas bagi kelompok paling rentan belum sepenuhnya terwujud. Meskipun MBG dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi secara universal, hambatan struktural menyebabkan distribusi manfaat belum optimal di wilayah pedalaman. Hal ini memperluas diskursus mengenai pentingnya integrasi antara prinsip normatif keadilan dan kapasitas implementasi.

Dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang menekankan efektivitas program makan sekolah dalam meningkatkan partisipasi pendidikan, penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan menyoroti dimensi sosial-politik implementasi di wilayah periferal. Jika studi sebelumnya lebih berfokus pada dampak output, penelitian ini menunjukkan bahwa makna kebijakan bagi masyarakat lokal sama pentingnya dengan capaian teknisnya.

Implikasi praktis dari temuan ini adalah perlunya fleksibilitas regulasi dan penguatan kapasitas daerah, termasuk dukungan anggaran dan pelatihan pengelola lokal. Integrasi bahan pangan lokal dalam standar menu juga dapat meningkatkan keberlanjutan program.

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian kebijakan sosial dengan menggabungkan perspektif keadilan distributif dan politik perifer dalam analisis implementasi program gizi berbasis sekolah. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan dilakukan studi komparatif antarwilayah pedalaman di Indonesia guna mengidentifikasi pola umum dan variasi implementasi. Selain itu, penelitian longitudinal dapat memberikan gambaran mengenai perubahan persepsi masyarakat terhadap legitimasi kebijakan seiring waktu.

Dengan demikian, hasil dan diskusi penelitian ini menegaskan bahwa implementasi MBG di Kabupaten Mappi bukan sekadar persoalan teknis distribusi pangan, melainkan fenomena sosial-politik yang mencerminkan dinamika relasi pusat–daerah, kapasitas kelembagaan, dan makna kehadiran negara di wilayah periferal.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Mappi tidak semata-mata merupakan persoalan teknis distribusi pangan, melainkan fenomena sosial-politik yang dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan lokal, struktur geografis, serta dinamika relasi pusat–daerah. Temuan utama mengidentifikasi adanya ketimpangan akses akibat keterbatasan infrastruktur dan logistik, keterbatasan koordinasi vertikal dalam sistem multilevel governance, serta kebutuhan adaptasi kebijakan terhadap konteks sosial-budaya setempat. Di sisi lain, program ini dimaknai masyarakat sebagai simbol kehadiran negara, sehingga efektivitas implementasinya berimplikasi langsung terhadap persepsi legitimasi pemerintah di wilayah periferal.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian kebijakan publik dengan mengintegrasikan perspektif implementasi kebijakan, keadilan distributif, dan politik perifer dalam analisis program sosial berbasis sekolah. Studi ini menegaskan bahwa prinsip keadilan distributif tidak cukup dipahami sebagai norma alokasi sumber daya, tetapi harus dibaca dalam relasi dengan kapasitas administratif dan kondisi struktural wilayah. Dengan demikian, penelitian ini memperluas literatur yang selama ini lebih berfokus pada capaian output program, dengan menekankan dimensi makna sosial dan politik dari implementasi kebijakan.

Secara praktis, temuan penelitian menggarisbawahi pentingnya fleksibilitas regulasi, penguatan kapasitas daerah, serta integrasi bahan pangan lokal dalam standar operasional program. Penyesuaian kebijakan berbasis konteks geografis dan budaya menjadi prasyarat untuk meningkatkan efektivitas serta keberterimaan sosial program di daerah pedalaman. Selain itu, penguatan koordinasi antarlevel pemerintahan dan dukungan sumber daya yang proporsional dapat mengurangi ketimpangan implementasi antarwilayah.

Dari sisi kebijakan, penelitian ini menekankan perlunya pendekatan afirmatif dalam distribusi program nasional, terutama di wilayah yang secara struktural menghadapi hambatan akses. Penerapan prinsip prioritas bagi daerah paling membutuhkan harus disertai mekanisme monitoring dan evaluasi yang sensitif terhadap kondisi lokal, sehingga tujuan pengurangan ketimpangan tidak berhenti pada tataran normatif.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan dilakukan studi komparatif lintas kabupaten di wilayah pedalaman guna mengidentifikasi pola implementasi yang lebih luas. Selain itu, penelitian longitudinal dapat memberikan gambaran mengenai perubahan persepsi masyarakat terhadap legitimasi kebijakan

seiring dengan peningkatan kapasitas daerah. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi empiris dan konseptual dalam memahami implementasi kebijakan sosial di wilayah perifer, serta memperkaya diskusi mengenai keadilan pembangunan dalam konteks desentralisasi Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh informan penelitian di Kabupaten Mappi, Papua Selatan, yang terdiri atas guru, kepala sekolah, aparat pemerintah daerah, pengelola program, orang tua siswa, serta tokoh masyarakat yang telah berpartisipasi secara aktif dan terbuka dalam proses pengumpulan data. Kontribusi mereka sangat penting dalam memberikan pemahaman empiris terkait implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah pedalaman.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Universitas Musamus Merauke atas dukungan akademik dan institusional yang diberikan selama pelaksanaan penelitian ini. Penghargaan turut diberikan kepada rekan-rekan akademisi serta pihak-pihak terkait yang telah memberikan masukan, diskusi ilmiah, dan fasilitasi selama proses penelitian hingga penyusunan artikel.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam mendukung kelancaran penelitian ini hingga layak untuk dipublikasikan.

REFERENSI

- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2021). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Hickey, S., & King, S. (2021). Understanding social accountability: Politics, power and building new social contracts. *The Journal of Development Studies*, 57(6), 933–950.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). *Laporan nasional program makan bergizi gratis*. Kementerian Kesehatan RI.
- McGibbon, R. (2020). State legitimacy and governance in peripheral regions. *Asian Journal of Political Science*, 28(3), 245–262.
- Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2021). *Qualitative research: A guide to design and implementation* (4th ed.). Jossey-Bass.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2020). Purposeful sampling for qualitative data collection and analysis in mixed method implementation research. *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research*, 47(4), 533–544.
- Pierre, J., & Peters, B. G. (2020). *Governance, politics and the state* (2nd ed.). Red Globe Press.
- Satriawan, E., & Hadi, S. (2022). Decentralization and inequality in Indonesia: A regional perspective. *Journal of Southeast Asian Economies*, 39(2), 123–140.
- Wuisan, D. (2025). Evaluasi implementasi kebijakan makan bergizi gratis di daerah tertinggal. *Jurnal Kebijakan Publik Indonesia*, 10(1), 45–60.
- World Bank. (2023). *Addressing inequality in Indonesia: Policy directions for inclusive development*. World Bank.
- Yin, R. K. (2022). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.